BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Globalisasi ditandai oleh perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Canggihnya teknologi modern dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, telah memberikan banyak manfaat dalam aspek sosial serta kemajuan ekonomi modern yang bergerak meningkat seperti penggunaan internet untuk kebutuhan bisnis baik berupa investasi maupun jual beli. Hasil dari perkembangan internet telah mengubah konsep jual beli dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa perlu keduanya bertemu secara langsung.¹ Penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa bertemu secara langsung dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik ataupun digital dengan begitu perkembangan hukum yang menjamin hak dan kewajiban penggunanya harus diselaraskan untuk mencapai kepastian hukum.

Bisnis konvensional bergerak ke arah modern dengan memanfaatkan jejaring social dan internet, kemudahan akses internet mengalami peningkatan yang sangat signifikan, penyedia jasa dan komoditas benda virtual mulai menjadi objek kebutuhan bisnis ideal, maraknya para pebisnis yang memanfaatkan internet menyebabkan timbul masalah baru dikemudian hari, mengenai regulasi hukum untuk mengaturnya. Selama ini Bank Indonesia

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm 3.

sebagai otoritas yang memiliki kewenangan mencetak uang, menjadi pihak ketiga sebagai perantara kepercayaan kedua belah pihak jika ingin melakukan transaksi dengan jumlah besar, bank merupakan sistem keuangan terpusat, kekurangan sistem keuangan penyimpanan terpusat yaitu jika bank mengalami gangguan, maka secara otomatis arus ekonomi akan menjadi terganggu, krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat memicu perekonomian global pada saat itu bergerak melambat tidak hanya Amerika Serikat yang terkena dampaknya melainkan negara-negara lain juga terkena termasuk Indonesia salah satunya.² Hal itulah yang menjadi alasan timbulnya mata uang digital dengan memanfaatkan teknologi kriptografi sebagai alternatif mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem keuangan yang dimiliki bank dalam transaksi yang berlaku saat ini.

Bitcoin adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. Bitcoin merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara. Dari sudut pandang pengguna, Bitcoin serupa seperti uang tunai di dunia internet. Bitcoin juga dapat dipandang sebagai sistem pembukuan tiga pencatatan paling menonjol yang ada saat ini mata uang yang baik tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral.³

Saat ini di Indonesia sebagian besar pengguna *cryptocurrency* (mata uang digital yang dibuat dengan konsep kriptografi) menggunakan bitcoin

² <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45495304> di akses pada tanggal 16 oktober 2018 pukul 11.25.

³ <https://bitcoin.org/id/faq> di akses pada tanggal 18 oktober 2018 pukul 09.12.

mereka untuk keperluan investasi, dan remitansi, yaitu melakukan proses transfer ke negara yang berbeda. Namun, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat Indonesia akan investasi bitcoin, juga terdapat beberapa kendala yang berpotensi dalam menyurutkan minat masyarakat terhadap *cryptocurrency*. Salah satu kendala terbesar di Indonesia terkait dengan berkembangnya *cryptocurrency* adalah Bank Indonesia yang belum mengakui dan bahkan melarang segala transaksi menggunakan bitcoin, karena bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁴

Lewat pernyataannya yang dirilis pada 13 Januari 2018, Bank Indonesia (BI) Siaran Pers No. 20/4/DKom⁵: Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Pemilikan *Cryptocurrency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *Cryptocurrency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan

⁴ <http://cryptouniversity.co.id/perkembangan-cryptocurrency-di-indonesia/> di akses pada tanggal 23 oktober 2018 pukul 10.30

⁵ https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx di akses pada tanggal 25 oktober 2018 pukul 20.12.

sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency*. Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem (pembayaran prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*.

Sebelumnya, pada 6 Februari 2014, BI sudah memperingatkan masyarakat bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan alat pembayaran yang sah. Ada aturan atau undang-undang yang digunakan BI sebagai dasar untuk melarang penggunaan Bitcoin. Dengan mengacu UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999, dan UU No. 6 Tahun 2009, BI menyatakan Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan alat pembayaran yang sah. Kemudian mengacu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, BI melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran/merchants dan penyelenggara teknologi finansial memproses transaksi yang menggunakan Bitcoin ataupun *Cryptocurrency*.

Dengan Pernyataan Bank Indonesia pengaturan tentang menggunakan mata uang kripto untuk melakukan transaksi yang tujuan adalah pembayaran adalah pelanggaran terhadap pasal 21 ayat 1 undang undang no 7 tahun 2011 yang menjadi persoalan hukum adalah kepemilikan bitcoin di Indonesia, jika melarang menggunakan mata uang kripto berlaku dalam wilayah negara

republik Indonesia namun bagaimana jika transaksi dilakukan ke luar negeri yang melegalkan sistem pembayaran menggunakan bitcoin, apakah pengguna bitcoin yang membeli barang dari luar negeri dengan menggunakan bitcoin dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang undang tentang mata uang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Mengenai praktik penggunaan bitcoin yang diterima sebagai alat pembayaran telah terjadi di wilayah Indonesia yaitu Bali. Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi 44 pedagang atau merchant di wilayah Bali menerima transaksi mata uang virtual, seperti Bitcoin. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana menjelaskan, 44 merchant tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata. Temuan tersebut, menurut dia, didapat setelah survei yang dilakukan pihaknya berdasarkan informasi masyarakat dan perkembangan media sosial. Causa menjelaskan, setelah timnya mendatangi langsung pelaku usaha tersebut, sebagian besar mengaku sudah menghentikan praktik pembayaran dengan mata uang digital. Kendati demikian, pihaknya akan tetap mengawasi pedagang-pedagang tersebut. terdapat dua merchant, salah satunya berbentuk kafe di kawasan Ubud, yang mengindikasikan masih menerima transaksi mata uang virtual. Saat ini, bank sentral itu masih memberikan peringatan berupa teguran dan meminta kepada pelaku usaha tersebut untuk tak lagi melayani transaksi pembayaran dengan mata uang virtual. Namun, apabila masih ditemukan melakukan praktik tersebut, maka pihaknya akan menggandeng kepolisian untuk menindak tegas.⁶

⁶<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin> di akses pada tanggal 26 Oktober 2018

Beberapa kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bitcoin dekat dengan tindak pidana pada pendanaan terorisme dan alternatif tempat melakukan pencucian uang.⁷ Bitcoin bersifat *pseudonymous* artinya pengguna bitcoin dapat memilih untuk menyembunyikan/menyamarkan identitas nya, dan tidak menyembunyikan/menyamarkan identitas nya, berbeda jika sifat nya *anonymous* yang berarti menutupi identitas nya agar tidak diketahui sama sekali. Sifat dari *pseudonymous* apabila penggunaan bitcoin di lakukan untuk suatu hal tindak pidana memungkinkan untuk dapat melakukan pencarian apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, pemerintah indonesia dapat mengatur regulasi tentang identitas pengguna bitcoin misal dengan mendaftarkan diri melalui ktp-elektronik tindakan preventif yang dapat mencegah terjadi penyalahgunaan bitcoin, teknologi yang melatarbelakangi timbul nya bitcoin adalah blockchain dapat dilihat sebagai sebuah sistem buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger*) dengan teknik kriptografi yang sangat canggih sehingga informasi yang tersimpan di dalamnya dapat diamankan sedemikian sehingga tidak mudah diubah. Meskipun memiliki fitur keamanan yang baik, informasi dalam blockchain dapat dilihat oleh pihak-pihak lain.⁸ Buku besar berupa rekaman dalam setiap proses transaksi yang terjadi sehingga proses penggunaan bitcoin untuk melakukan tindak pidana dapat untuk di deteksi.

Kasus tindak pidana yang melibatkan bitcoin sebagai alat pembayaran seperti pembelian obat-obatan terlarang, senjata, pendanaan terorisme, pencucian uang pada kenyataannya tetap mampu terdeteksi oleh aparat penegak hukum, dan juga menjadi boomerang bagi para pelaku kejahatan, jika

⁷<http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/23/gubernur-bi-sebut-bitcoin-dekat-dengan-tindakan-pencucian-uang> di akses pada tanggal 12 november pukul 10.13

⁸<http://theconversation.com/teknologi-blockchain-untuk-mengawal-penerimaan-negara-dari-ppn-87021> di akses pada tanggal 14 november pukul 11.12.

seorang penjahat bisa menyamarkan identitas nya untuk tidak diketahui maka juga berlaku sama bagi aparat penegak hukum, tentu mempersempit ruang gerak uang yang di dapat dari hasil kejahatan disembunyikan dalam bentuk bitcoin. saat ini member bitcoin di Indonesia sudah berjumlah lebih dari 1,5jt orang yang terdaftar dalam indodax tempat jual beli digital asset *cryptocurrency*.⁹ Bitcoin illegal sebagai mata uang dan penggunaan bitcoin untuk suatu transaksi dapat diancam dengan hukuman pidana, langkah tersebut dan keputusan BI memberikan pengaruh karena pengguna bitcoin di Indonesia sebagian besar menganggap bitcoin adalah asset digital, alat investasi, merupakan emas dunia virtual yang diperjual-belikan dan menjadikan ancaman hukum pidana sebagai alat untuk mengatur tentang investasi jual beli bitcoin adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebab bitcoin hanyalah produk yang lahir dari perkembangan teknologi yang diperjual-belikan sebagai barang bukan sebagai mata uang.

Pasal 21 ayat 1 Undang Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 21 ayat 2 Undang Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

pengecualian menggunakan rupiah yaitu :

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional

⁹ <https://indodax.com/> di akses pada tanggal 9 januari 2019 pukul 15.23.

Pasal 33 ayat 1 Undang Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mengenai masalah yurisdiksi atas pelanggaran penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran menjadi tidak pasti apabila dilakukan untuk transaksi perdagangan internasional, tidak wajib menggunakan rupiah apabila transaksi dilakukan dalam perdagangan internasional, masuk akal jika bitcoin pada saat itu kedudukannya memiliki value sebagai mata uang. Sama halnya dengan mata uang dollar, apabila ingin membeli suatu barang di negara yang memakai dollar sebagai mata uang, maka pemilik rupiah akan menukarkan dulu rupiahnya menjadi dollar. karena rupiah tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran di negara tersebut. jika pun dianggap berbeda namun masalah tetap akan sama jika bitcoin tidak dapat dirupiahkan di Indonesia, maka pemilik bitcoin akan menukarkannya dengan mata uang asing, setelah mendapat mata uang asing yang melegalkan bitcoin, maka si pemilik akan menukarkan mata uang asing yang didapat dari penukaran bitcoin menjadi rupiah. Selanjutnya setelah terjadi transaksi bagaimana menentukan posisi delik bahwa penggunaan mata uang itu adalah merupakan pelanggaran terhadap undang undang tentang mata uang dan penggunaannya dapat dipidanakan karena menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran keluar negeri yang padahal undang undang itu jelas mengecualikan penggunaan

rupiah dalam perdagangan internasional. Jikapun orang berada di wilayah Indonesia memakai bitcoin membeli barang keluar negeri yang melegalkan pembayaran bitcoin dapat dikatakan melanggar pasal 21 ayat 1 undang undang tentang mata uang karena berada di wilayah Indonesia, lalu bagaimana jika orang itu pergi keluar negeri yang melegalkan bitcoin dan menjadikan alat pembayaran apa orang tersebut sama juga dengan yang pertama. Ketidakpastian mengenai yurisdiksi menjadikan pasal 21 ayat 1 lemah dalam implementasi nya dan mustahil untuk bank Indonesia menghentikan laju perkembangan teknologi cryptocurrency karena sifat bitcoin yang universal dan terdesentralisasi

Kelemahan dari pasal 21 ayat 1 No 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang memang bersifat terbatas penggunaan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang tujuannya adalah pembayaran dalam wilayah negara republik Indonesia, namun pengecualian penggunaan rupiah yang tertuang dalam ayat 2 huruf c undang undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang mengenai transaksi perdagangan internasional di jelaskan lebih lanjut dalam peraturan bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 penjelasan mengenai transaksi perdagangan internasional termuat dalam pasal 8 yaitu :

- a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau
- b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah Negara yang dilakukan dengan cara:
 1. pasokan lintas batas (*cross border supply*); dan
 2. konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*).

Status Hukum Bitcoin di Indonesia adalah illegal hanya sebagai mata uang jika digunakan untuk suatu transaksi yang tujuannya adalah

pembayaran namun untuk kepemilikan adalah merupakan hak individu bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap undang undang namun demikian keluar nya pernyataan Bank Indonesia (BI) pada tanggal 13 Januari 2018, Siaran Pers No. 20/4/DKom yang memperingatkan kepada para pemilik bitcoin untuk tidak memperjual-belikan *Cryptocurrency* membuat ruang gerak penggunaan bitcoin semakin dipersempit, sehingga dalam praktek nya aparat penegak hukum akan salah memahami status hukum mengenai kepemilikan bitcoin dan dikhawatirkan menyebabkan terjadi nya kriminalisasi terhadap kepemilikan bitcoin karena kurang nya pengetahuan tentang regulasi hukum yang mengatur kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia.

Perbuatan yang dilarang terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan larangan bank Indonesia terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *Cryptocurrency* membuat ketidakpastian hukum dan dampak yang besar bagi para pemilik bitcoin di Indonesia, apakah dengan kepemilikan bitcoin sama artinya secara tidak langsung pemilik bitcoin melakukan perbuatan pidana dan merupakan kejahatan terhadap mata uang. Sebab mata uang bukan hanya sebagai alat tukar / pembayaran tapi merupakan symbol dari negara yang berkedaulatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kepemilikan Bitcoin Yang Diklasifikasi Sebagai Perbuatan Pidana Di Indonesia”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian, maka permasalahan pokok pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Bitcoin Merupakan Suatu Tindak Pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Penerapan Asas Legalitas Dan Asas Hukum Nasional Aktif Dalam Hukum Pidana Terkait Yurisdiksi terhadap pemilik bitcoin yang menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran ke luar negeri?
3. Bagaimanakah akibat hukum jika para pihak menyepakati perjanjian pembayaran melalui bitcoin yg merupakan hubungan privat dan kesepakatan para pihak dalam bentuk pertukaran dimana bitcoin sebagai barang bukan mata uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meneliti mengenai hukum apakah kepemilikan Bitcoin Di Indonesia Sebagai Tindak Pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan meneliti berlakunya asas hukum nasional aktif dalam hukum pidana terkait penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran

keluar negeri yang melegalkan bitcoin

3. Untuk mengetahui dan meneliti dalam menentukan subjek hukum yang bersalah atas terjadinya pertukaran barang berupa bitcoin yang tujuannya merupakan pembayaran antara kesepakatan para pihak menurut undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya serta dapat melengkapi literatur pada pengajaran hukum kriminologi dan digital forensik menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, khususnya pengguna bitcoin sebagai pemilik bitcoin. Selain itu, dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas tentang perkembangan hukum berkaitan dengan teknologi digital dimasa depan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu Negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Konsekuensi dari pembukaan undang undang alinea keempat adalah negara memiliki tujuan untuk melindungi mensejahterakan mencerdaskan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam menjalankan tujuan negara konsepsi yang melandasi nya adalah hukum bahwa negara berdasarkan hukum oleh karenanya setiap kebijakan harus dilandasi dan berpedoman pada hukum kaitanya dengan perkembangan ekonomi modern yang memanfaatkan teknologi.

Pasal 33 Undang Undang dasar 1945 perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip yaitu:

- a. kebersamaan,
- b. efisiensi berkeadilan
- c. berkelanjutan
- d. berwawasan lingkungan
- e. kemandirian

Serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, Indonesia adalah suatu negara yang berdaulat, negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Dalam bukunya, Reza Wattimena mengutip pendapat Roussov yaitu: “Institusi politik yang terbentuk dari persatuan individu-individu melalui proses kontrak sosial, terutama ketika

aktif disebut sebagai yang berkuasa. Institusi ini adalah otoritas tertinggi di dalam suatu negara, dan terbentuk dari seluruh warga negara. Ia berhak membuat dan mempublikasikan hukum, dan rakyat sebagai anggota dari institusi ini, berpartisipasi dalam merencanakan hukum tersebut, sehingga rakyat sendiri sudah menjadi subjek dan otomatis harus tunduk kepada hukum.¹⁰

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equal protection*), atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹¹

Hukum pidana sebagai hukum publik memiliki arti bahwa negara terlibat dalam mengatur perilaku seseorang/individu terhadap suatu perbuatan yang dapat dilakukan dan tidak dilakukan untuk diterapkan. dalam hal yang diberlakukannya hukum pidana ini, maka dibatasi oleh hal yang sangat penting, yaitu batas waktu, batas tempat dan orang, sehingga walaupun negara

¹⁰ Reza A.A Wattimena, *Konisius*, Yogyakarta, 2011, hlm 55

¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permasiyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta : 2012, hlm 46.

diberikan hak penuh untuk menjalankan aturan yg bersifat memaksa dan mengambil hak orang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu undang undang dan harus dihukum, namun negara juga tetap memperhatikan prinsip prinsip dasar sebelum penegakan hukum itu dilakukan yang artinya penggunaan pemidanaan kepada seseorang itu harus dalam rangka tujuan kemanfaatan hukum disamping memberi kepastian hukum.

Menurut Jan Remmelink:¹²

“Pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Prinsip yang di tentukan dalam pasal 1 mensyaratkan bahwa harus terlebih dulu adanya aturan tentang suatu perbuatan tertentu yang dilarang agar perbuatan itu dapat dipidana dan asas ini lah yang dikenal dengan asas legalitas atau principle of legality.¹³ Anselm Von Fuerbach melakukan upaya yang lebih konkret dalam memperkenalkan asas legalitas yang terkenal dengan ucapannya dalam bahasa latin (dalam bukunya yang berjudul lehrbuch des peinlichen Recht 108) yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang lebih dulu menentukan demikian.¹⁴ Terkait definisi asas legalitas, terdapat kesamaan pandangan di

¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.7.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 stelsel pidana,tindak pidana,teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 170.

¹⁴ Ibid, hlm 171.

antara para ahli hukum pidana antara lain Hazewinkel Suringa, van Bemmelen, van Hattum, Enschede, Jan Remmelink, D. Schaffmeister bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.¹⁵ Merujuk kepada pernyataan Von Feurbach tersebut jelas bahwa asas legalitas melarang undang-undang berlaku surut terhadap perbuatan sebelum undang-undang itu diberlakukan. Dalam kaitan ini, jelas bahwa prinsip kepantasan (*behoorlijke*) atau kepatutan suatu ancaman pidana yang dimuat dalam suatu Undang-Undang Pidana adalah terletak dari ketepatan waktu (*Lex Temporis*) Penerapannya terhadap perbuatan seseorang yang melanggar undang undang.¹⁶

Pada Sistem Civil Law Kodifikasi merupakan salah satu asas yang di anut sejak lama. Implikasi dari asas kodifikasi ini adalah pada sistem civil law terdapat ketentuan tertentu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan umum dan berlaku bagi semua undang-undang pidana diluar Kitab hukum tersebut. Konsekuensi logis dari doktrin tersebut maka muncul pendapat yang mengemukakan bahwa setiap ketentuan pidana diluar kitab hukum tidak boleh bertentangan dengan isi ketentuan umum yang terdapat pada Kitab Undang Undang tersebut.¹⁷

Selain berfungsi sebagai alat atau instrument penguji kritis terhadap sistem hukum yang berlaku saat ini, nilai nilai atau asas-asas hukum juga

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 7.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm 106.

¹⁷ *Ibid*, hlm 127.

berfungsi untuk menguji secara kritis apakah suatu produk hukum atau suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan hukum yang telah dibuat itu sesuai dengan nilai-nilai atau asas-asas hukum, atau justru bertentangan dengan nilai-nilai atau asas-asas hukum yang mendasarinya. Apabila suatu produk hukum atau suatu peraturan perundang undangan atau keputusan hukum yang telah dibuat bertentangan dengan nilai-nilai atau asas-asas hukum yang mendasarinya, maka produk hukum atau suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan hukum tersebut ditinjau ulang atau bahkan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku atau dirumuskan kembali (reformulasi) dengan penyesuaian terhadap asas-asas hukum atau nilai-nilai hukum orientasi yang hendak dicapai.¹⁸ Karena jika tidak suatu perbuatan yang tadinya merupakan bukan perbuatan pidana, dengan adanya suatu aturan undang undang menjadi perbuatan pidana, dalam bukunya Kristian mengutip pendapat Soerjono Soekanto yaitu:¹⁹

“Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana menjadi perbuatan pidana”

Dalam rangka pembuatan dan perumusan hukum pidana yang baik khususnya dalam penetapan kebijakan kriminalisasi, diperlukan beberapa pendekatan. Pendekatan sebagaimana dimaksud harus tetap mencerminkan karakteristik dari politik criminal yang rasional politik criminal yang rasional

¹⁸ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (integral policy) pertanggung jawaban pidana korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 219.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 62.

harus berorientasi pada kebijakan dan oleh karena itu, di dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi dan juga (kebijakan penalisasi) sebagai masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana, harus pula berorientasi pada kebijakan dan nilai. Pendekatan pendekatan digunakan beritik tolak dari konsepsi integral antara kebijakan criminal dengan kebijakan social (kebijakan Pembangunan Nasional) dan harus merupakan satu kesatuan terpadu dalam upaya penanggulangan kejahatan.²⁰

Dalam teori pembedaan di kenal Teori Relatif , Duff dan Gerland Menamakan paham ini sebagai *consequentialism* yang menyatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar atau salah dari suatu perbuatan, semata mata tergantung pada akibat yang ditimbulkannya secara keseluruhan. Suatu perbuatan dianggap benar apabila akibat yang dihasilkannya berupa kebaikan dan sebaliknya dianggap salah bila akibat dari perbuatan tersebut menghasilkan keburukan.²¹ Dengan begitu konteks dari dampak kepemilikan bitcoin tidak lepas dari penggunaan bitcoin yang pasti memiliki dampak baik dan buruk. namun jika ternyata minat terhadap bitcoin meningkat secara otomatis kepemilikan bitcoin juga menjadi hal yang tidak dapat ditahan hanya karena suatu aturan tertentu konsekuensi logis dari kepemilikan bitcoin adalah pasti digunakan untuk mencari keuntungan maka merujuk dari pernyataan teori relatif tentang tujuan pembedaan harus meletakkan posisi perbuatan itu baik dan buruk dari yang dihasilkannya, perbuatan yang melibatkan bitcoin secara tidak langsung membuka lowongan kerja bagi

²⁰ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 117.

²¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 53.

segolongan masyarakat tertentu, bahkan juga menjadi lahan baru untuk para pebisnis mencari keuntungan walau dengan catatan resiko nya tinggi karena nilai harga tidak stabil dari bitcoin itu sendiri dan perbuatan pidana tidak melekat pada bitcoin melainkan hanya hinggap bersifat rentan untuk jadi alat kejahatan, dan tentu hal itu sifat nya adalah universal.

Hukum Pidana dengan ancaman sanksi pidana nya oleh Herbert L. Packer bukan dimaksudkan sebagai *prime guarantor* and *prime threatener of human freedom* artinya sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²² Penggunaan hukum pidana atau kriminalisasi dalam suatu pelanggaran hukum menurut sudarto harus di dasarkan pada empat hal yaitu:²³

1. memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spritual berdasarkan pancasila sehubungan dengan ini penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. perbuatan yang di usahakan untuk di cegah atau tanggulasi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau formal spiritual) atas warga masyarakat:

²² Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, hukum pidana: horizon baru pasca reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 18.

²³ *Ibid*, hlm. 281.

3. memperhitungkan prinsip biaya atau hasil (*cost and benefit principle*)
4. memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overlasting*)

Karakteristik hukum pidana nasional mendatang sangat erat kaitanya dengan prinsip penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum bersamaan dan berkeadilan, muladi dengan mengutip pendapat dari Nigel Walker mengemukakan bahwa:²⁴ Hukum pidana sebagai ultimum remedium jangan sampai terlalu mudah digunakan untuk:

1. tujuan pembalasan
2. bilamana korban nya tidak jelas
3. mencapai tujuan tertentu
4. bilamana kerugian akibat pemidanaan lebih besar dari pada kerugian Akibat tindak pidana itu sendiri
5. bilamana hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan jika dibandingkan perbuatan yang dikriminalisasikan
6. apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat secara luas dan
- 7 apabila sudah diprediksi tidak akan lebih efektif

Charles O. Jones Mendefinisikan atau mengartikan kebijakan (*Policy*) sebagai keputusan tetap yang ditandai dengan adanya konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang

²⁴ *Ibid*, hlm. 15-16.

memenuhi keputusan tersebut.²⁵ Lebih khusus, dalam bidang hukum terutama hukum pidana dikenal istilah kebijakan hukum pidana.²⁶ Menurut Dwidja Priyatno Kebijakan Hukum pidana adalah suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa yang dilakukan dalam menghadapi problema yang dimiliki oleh hukum pidana dan dengan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan sehingga tercipta hukum pidana yang baik sebagai sarana penal dalam upaya penganggulangan serta melindungi masyarakat dari kejahatan dan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat²⁷

Didalam asal 21 ayat 2 Undang Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pengecualian menggunakan rupiah yaitu :

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional

dalam peraturan bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 penjelasan mengenai transaksi perdagangan internasional termuat dalam pasal 8 yaitu :

- a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayahpabeau Republik Indonesia; dan/atau

²⁵ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, Grafindo, Jakarta, 1994, hlm.74.

²⁶ Christian, *op.cit*, hlm. 222.

²⁷ Dwidja Priyatno, *op.cit*, hlm. 110

b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah

Negara yang dilakukan dengan cara:

1. pasokan lintas batas (cross border supply); dan
2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad).

Dalam Bukunya Chairul Huda Mengutip pendapat Savitz Suatu Perbuatan secara teoritis dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi lima syarat yaitu:²⁸

- 1) *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor* (Tindakan itu harus menimbulkan kerugian bagi seseorang)
- 2) *The Act must be legally prohibited in the time it is committed:* (Undang Undang telah melarang perbuatan itu)
- 3) *The Perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act:* (pelaku harus memiliki niat jahat pada saat melakukan perbuatan)
- 4) *There must be causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it and* (harus ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan bahaya)
- 5) *There must be some be legally prescribed punishment for anyone convicted of the act.* (harus ada seseorang yang dihukum akibat perbuatan itu)

²⁸ Chairul Huda, *dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta, 2006, hlm 27.

Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika tidak di larang oleh undang undang pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana suatu perbuatan yang onwetmatig (bertentangan dengan undang undang) yang dikenal sebagai mala prohibita. Perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang undang pidana dikenal sebagai criminal extra ordinaria.²⁹ Suatu perbuatan yang onrechtmatig (bertengangan dengan hukum).

Dari Perspektif Asas Legalitas “Mala Prohibita” merupakan perbuatan yang strafbaar (dapat dipidana) sedang criminal extra ordinaria hanya merupakan perbuatan yang strafwaardig (patut di pidana) dan bukan strafbaar karena tidak dilarang oleh undang undang pidana. Secara prinsip dilarang mendefinisikan suatu perbuatan sebagai mala prohibita dengan cara mengkonstruksikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana diluar yg dilarang undang – undang pidana.³⁰

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³¹ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai

²⁹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* , Rineka cipta ,Jakarta ,2000, hlm 3.

³⁰ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekontruksi asas legalitas Hukum pidana sejarah asas legalitas dan gagasan pembaharuan filosofis hukum pidana*, setara press, malang , 2014 , hlm. 3.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 35.

suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³² Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah sebagai berikut :³³

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.”(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

Pada penelitian hukum normatif ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁴

³² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Bayu Publishing. Malang. hlm.26.

³³ Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. hlm.32.

³⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 34.

2. Metode Pendekatan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).³⁵

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UUD NRI Tahun 1945 dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya. Digunakannya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsistensi/kesesuaian mengenai pengaturan mata uang secara Khusus dalam undang undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dalam

³⁵ *Ibid.* hlm 93

hubungan terhadap pelanggaran yang menimbulkan sanksi ancaman pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Digunakannya pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ini untuk menganalisis kerangka berfikir atau kerangka konseptual yang sesuai dengan penelitian ini. Sehingga tentunya perlu untuk mengemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, asas *legalitas* dan teori-teori lainnya yang relevan.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-

sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian penelitian ini.

Adapun termasuk data-data sekunder :

- 1). Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke 4.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 - d) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - e) Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
 - f) Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - g) Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
 - h) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan teknologi finansial
 - i) .Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 1960 Tentang Penggunan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

- 2). Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pada pakar hukum.
- 3). Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan artikel surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara :

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Penelitian Ini, yang kemudian penulis akan menyusun, memetakan serta membaca bahan-bahan tersebut kedalam suatu kerangka metodis yang padu.
- b. Tidak hanya bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder juga dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara penelusuran melalui Internet. Penulis dalam hal ini membaca buku-buku yang dijadikan literatur, Jurnal-Jurnal hukum yang relevan, Skripsi, Tesis dan juga disertasi Hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara:

a. Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan, yaitu berupa buku, jurnal hukum, kamus hukum dan catatan. Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisa adalah Kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan Hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya.³⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif*, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Op.Cit.* hlm 183.

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁷

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode *Yuridis Kualitatif*, yaitu “seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas atau dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis berharap dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.³⁸

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Jalan Kawalayaan Indah II, Jl. Soekarno-Hatta No.4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

³⁸ *Ibid*, hlm. 116

G. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini akan dituangkan dalam Penelitian, yang disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang alasan pemilihan Judul, Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : KAJIAN MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG KEPEMILIKAN BITCOIN SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DI INDONESIA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang akan menguraikan teori teori hukum pidana, tujuan pemidanaan, Konsep Konsep Hukum Pidana , kajian teori-teori kebijakan.

Bab III : PRAKTIK PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ASSET DIGITAL DALAM TRANSASKI JUAL BELI DI INDONESIA

Bab ini berisi praktik penggunaan bitcoin, data data yang menunjang perkembangan bitcoin.

Bab IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Bab ini akan mengemukakan hasil penelitian yang berisi

kelebihan dan kekurangan undang undang mata uang dalam mengatur perkembangan teknologi uang digital..

Bab V : Bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan yang telah dianalisa dan berisi saran yang berkaitan dengan penelitian.